



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 12 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF

LEMBAGA : KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI

UNIT KERJA : UNIVERSITAS ANDALAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : MAI EFDI
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 911848

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 620.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 233 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 390.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 36 m2/120 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 117.000.000

1. MOBIL, TOYOTA NEW AVANZA VELOZ Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 100.000.000
2. MOTOR, HONDA E1F02N11M2A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 7.000.000
3. MOTOR, HONDA ACB2J21B02A/T Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000
4. MOTOR, HONDA D1502N12L1A/T Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 208.400.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 3.732.210

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 949.132.210

III. HUTANG Rp. 75.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 874.132.210

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.